

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori Agensi (*Agency Theory*) merupakan teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Prinsip utama teori ini adalah menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Perbedaan kepentingan ini dapat disebabkan ataupun menyebabkan timbulnya informasi asimetri (kesenjangan informasi) antara pemegang saham dan organisasi (Jensen dan Meckling, 1976; Manurung dan Suhartadi, 2014).

Sebagai pengelola perusahaan, manajer mengetahui lebih banyak informasi tentang perusahaan daripada pemegang saham karena manajer memiliki akses yang lebih luas. Sedangkan pemegang saham (*principal*) tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja manajer dan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya asimetri informasi. Menurut Scott (2012), asimetri informasi ada 2 macam, yaitu :

1. *Adverse Selection*

Manajer mengetahui semua informasi perusahaan dengan baik, entah itu keadaan perusahaan ataupun prospek perusahaan yang mungkin dicapai. Keadaan ini dimanfaatkan oleh manajer untuk tidak memberikan informasi yang sebenarnya atau cenderung menyesatkan pemegang saham.

## 2. *Moral Hazard*

Kegiatan yang dilakukan oleh manajer tidak diketahui secara seutuhnya oleh pemegang saham, hal ini dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan pekerjaan diluar kontrak kerjanya dengan pemegang saham.

Selain asimetri informasi, biaya agensi juga mungkin dapat timbul sebagai akibat adanya konflik keagenan tipe 1. Biaya ini muncul karena adanya persepsi saling tidak percaya antara *principal* dengan *agent*. Menurut Godfrey (2010), biaya agensi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu :

### 1. *Monitoring Cost*

Biaya pemantauan perilaku *agent* dimana *principal* mengeluarkan biaya untuk mengukur, mengamati dan mengendalikan perilaku *agent*.

### 2. *Bonding Cost*

Biaya pembuatan dan penyesuaian mekanisme yang dilakukan oleh *agent* untuk menjamin mereka, biaya ini ditanggung oleh *agent*.

### 3. *Residual Loss*

Biaya ini terjadi karena adanya dampak atas tindakan yang dilakukan *agent* yang terkadang berbeda tanggung jawabnya yakni untuk memaksimalkan kepentingan kekayaan dari *principal*.

Selain konflik keagenan tipe 1, masih ada konflik keagenan tipe 2. Konflik keagenan tipe 2 terjadi pada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham secara bersama – sama mengelompokkan diri menjadi pemegang saham pengendali untuk mengumpulkan informasi sekaligus mengawasi kinerja manajemen, sehingga

konflik yang terjadi bukan antara pemegang saham dengan manajemen melainkan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non-pengendali.

## 2.2. Teori Legitimasi

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Kirana, 2009).

Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan karena legitimasi dari masyarakat merupakan salah satu faktor bagi perkembangan perusahaan kedepannya. Menurut Gray *et al* (1996) dalam Ahmad dan Sulaiman (2004), legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan masyarakat.

Teori legitimasi didasarkan pada konsep “kontrak sosial” (Mathews, 1993; Patten, 1992), dimana perusahaan memberikan informasi dalam pengungkapan non-keuangan untuk melegitimasi kegiatan mereka dan konsisten dengan konsep kewarganegaraan korporat (Hooghiemstra, 2000; Brammer dan Pavelin, 2006). Manajer perusahaan menggunakan pengungkapan lingkungan untuk membentuk kesan pemangku kepentingan tentang peran dan menunjukkan tingkat kepuasan dari tanggung jawab tersebut (Magness, 2006).

Pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas dimana perusahaan berada dan

memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang (Chariri & Ghozali, 2007).

## **2.3. Pengungkapan Emisi Karbon**

### **2.3.1. Pengertian Emisi Karbon**

Emisi karbon merupakan suatu ukuran atas total emisi gas rumah kaca yang disebabkan secara langsung dan tidak langsung oleh suatu organisasi, produk, peristiwa, atau seseorang. Sebagian besar gas rumah kaca umumnya dihasilkan oleh aktivitas manusia, yaitu karbon dioksida, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik, pemanasan, transportasi (Heizer, 2014).

Salah satu penyumbang emisi karbon adalah aktivitas operasi perusahaan. Dalam menghadapi perubahan iklim, perusahaan diharapkan mengungkapkan aktivitas mereka yang mempengaruhi peningkatan perubahan iklim, salah satunya pengungkapan emisi karbon. Di Indonesia, pengungkapan dan pelaporan atas informasi ini mulai berkembang dengan adanya peraturan pemerintah seperti Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan adanya tuntutan dari *stakeholder* perusahaan. Peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk mengurangi emisi karbon.

### 2.3.2. Pengungkapan Emisi Karbon

Saat ini, perusahaan sudah mulai dituntut untuk lebih terbuka terhadap informasi mengenai perusahaan tersebut. Informasi yang diungkapkan di laporan keuangan perusahaan diharapkan lebih transparan dan jujur. Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dikelompokkan menjadi 2, yaitu *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*.

*Mandatory disclosure* merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan *voluntary disclosure* merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan oleh para pemakai laporan keuangan. Pada umumnya, perusahaan akan mengungkapkan informasi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan (Hanifah, 2015). Perusahaan yang mengungkapkan informasi dengan lebih lengkap dapat meningkatkan citra publik dan reputasi mereka, serta membangun keunggulan kompetitif (Waddock & Graves, 1997).

Pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu contoh dari pengungkapan lingkungan yang merupakan bagian dari laporan tambahan yang dinyatakan dalam PSAK No. 1 (revisi 2013). Pengungkapan emisi karbon dalam penelitian ini menggunakan beberapa item yang didasarkan pada identifikasi Choi *et al.* (2013) dalam Jannah dan Muid (2014). Untuk mengukur sejauh mana pengungkapan karbon, Choi *et al* mengembangkan *checklist* berdasarkan lembar permintaan informasi yang diberikan oleh CDP (*Carbon Disclosure Project*).

Choi *et al* (2013) dalam Jannah dan Muid (2014) menentukan lima kategori besar yang relevan dengan perubahan iklim dan emisi karbon sebagai berikut : risiko dan peluang perubahan iklim (GHG/*Greenhouse Gas*), konsumsi energi (EC/*Energy Consumption*), pengurangan gas rumah kaca dan biaya (RC/*Reduction and Cost*) serta akuntabilitas emisi karbon (AEC/*Accountability of Emission Carbon*). Dalam lima kategori tersebut, terdapat 18 item yang diidentifikasi. Berikut *checklist* pengungkapan emisi karbon yang ditunjukkan pada tabel 2.1 :

**Tabel 2.1**  
***Carbon Emission Disclosure Checklist***

<b>Kategori</b>	<b>Item</b>
Perubahan Iklim : Risiko dan Peluang/ (CC/ <i>Climate Change</i> )	CC-1 : Penilaian/ deskripsi terhadap risiko (peraturan/regulasi baik khusus maupun umum) yang berkaitan dengan perubahan iklim dan tindakan yang diambil untuk mengelola risiko tersebut.
	CC-2 : Penilaian/deskripsi saat ini (dan masa depan) dari implikasi keuangan, bisnis dan peluang dari perubahan iklim.
Emisi Gas Rumah Kaca (GHG/ <i>Greenhose Gas</i> )	GHG-1 : Deskripsi metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca (misalnya protokol GRK atau ISO).
	GHG-2 : Keberadaan verifikasi eksternal kuantitas emisi GRK oleh siapa dan atas dasar apa.
	GHG-3 : Total emisi gas rumah kaca (metric ton CO <sub>2</sub> -e) yang dihasilkan.

	GHG-4 : Pengungkapan lingkup 1 dan 2, atau 3 emisi GRK langsung.
	GHG-5 : Pengungkapan emisi GRK berdasarkan asal atau sumbernya (misalnya : batu bara, listrik, dll).
	GHG-6 : Pengungkapan emisi GRK berdasarkan fasilitas atau level segmen.
	GHG-7 : Perbandingan emisi GRK dengan tahun-tahun sebelumnya.
Konsumsi Energi (EC/ <i>Energy Consumption</i> )	EC-1 : Jumlah energi yang dikonsumsi (misalnya : tera-joule atau PETA-joule).
	EC-2 : Kuantifikasi energi yang digunakan dari sumber daya yang dapat diperbaharui.
	EC-3 : Pengungkapan menurut jenis, fasilitas atau segmen.
Pengurangan Gas Rumah Kaca dan Biaya (RC/ <i>Reduction and Cost</i> )	RC-1 :Detail/rincian dari rencana atau strategi untuk mengurangi emisi GRK.
	RC-2 : Spesifikasi dari target tingkat/level dan tahun pengurangan emisi GRK.
	RC-3 : Pengurangan emisi dan biaya atau tabungan ( <i>costs or savings</i> ) yang dicapai saat ini sebagai akibat dari rencana pengurangan emisi karbon.
	RC-4 : Biaya emisi masa depan yang diperhitungkan dalam perencanaan belanja modal ( <i>capital expenditure planning</i> ).
Akuntabilitas Emisi Karbon (AEC/ <i>Accountability of Emission Carbon</i> )	AEC-1 : Indikasi dimana dewan komite (atau badan eksekutif lainnya) memiliki tanggung jawab atas tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim.

	AEC-2 : Deskripsi mekanisme dimana dewan (atau bada eksekutif lainnya) meninjau kemajuan perusahaan mengenai perubahan iklim.
--	---

**Sumber : Choi *et al*, 2013 dalam Jannah dan Muid, 2014**

#### **2.4. Dewan Direksi**

Menurut Pasal 1 dalam Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dapat disimpulkan bahwa dewan direksi bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selain itu, dewan direksi juga bertanggung jawab atas perolehan legitimasi perusahaan dari publik dan pemangku kepentingan.

Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dewan direksi adalah memimpin pelaksanaan roda perusahaan setiap hari melalui kebijakan *strategic* yang telah disepakati bersama untuk mencapai target dan kinerja yang telah ditentukan oleh RUPS dengan meminimalkan risiko serta tetap menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder* (Daniri, 2005).



## 2.5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah besarnya saham yang dimiliki manajemen dari total saham yang beredar. Kepemilikan manajerial juga berarti manajer di suatu perusahaan sebagai pemegang saham. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki manajer (Kusumaningtyas, 2015). Adanya proporsi kepemilikan yang cukup tinggi maka manajer akan merasa ikut memiliki perusahaan sehingga akan berusaha melakukan tindakan – tindakan yang dapat memaksimalkan kemakmurannya.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan individu manajer sebagai pemegang saham dengan kepentingan perusahaan.

Dalam kepemilikan manajerial yang tinggi, kemungkinan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer akan menurun karena manajer merasakan langsung dampak atas setiap keputusan yang diambil. Setiap keputusan yang diambil oleh manajer akan menentukan dampak yang diterima pemegang saham, sehingga manajer sekaligus pemegang saham akan selalu berupaya meningkatkan nilai perusahaan agar terciptanya kemakmuran bagi dirinya sendiri selaku pemegang saham perusahaan. Sementara itu, apabila dalam perusahaan tidak ada kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang saham kemungkinan hanya akan mementingkan kepentingannya sendiri (Christiawan dan Tarigan, 2007).

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Pada pertengahan 1990-an, perusahaan polutan Amerika Utara telah mulai memperhitungkan perubahan iklim yang menerima peraturan emisi gas rumah kaca sebagai ancaman besar (Kolk *et al*, 2008). Saat ini, di negara – negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada dan Australia perkembangan penelitian terkait emisi karbon sudah banyak dikembangkan.

Penelitian – penelitian tersebut berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian dunia mengenai perubahan iklim yang berdampak pada kelangsungan perusahaan (Jannah, 2014). Penelitian – penelitian sebelumnya meneliti tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan informasi terkait emisi karbon pada laporan keuangan perusahaan.

Penelitian pertama yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian tentang Peran *Corporate Governance* dan Komite Lingkungan dalam Pengungkapan Gas Rumah Kaca yang diteliti oleh Manurung *et al* (2017). Penelitian ini menganalisis dampak pengungkapan gas rumah kaca yang terjadi pada perusahaan sebagai dampak pemanasan global yang setiap tahun semakin meningkat serta untuk mengetahui peran dari *corporate governance* (dewan komisaris independen, dewan direksi, keragaman gender dan kepemilikan institusional) dan komite lingkungan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris dan keberagaman gender tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emis gas rumah kaca. Sedangkan dewan direksi dan komite lingkungan memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca.

Penelitian kedua adalah penelitian tentang Faktor yang Menentukan Pengungkapan Emisi Karbon yang diteliti oleh Kiswanto (2016). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh kinerja lingkungan, visibilitas organisasional, kondisi keuangan, dan mekanisme tata kelola terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan visibilitas organisasi, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan kinerja lingkungan, *financial distress*, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Choi *et al* (2013) yaitu *Company Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan top 100 di Australia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam industri intensif (*Emission Intensive Industries*), tingkat emisi karbon, ukuran perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, kualitas *corporate governance*, berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

Penelitian keempat adalah penelitian Giannarakis *et al* (2016) yang berjudul *The Relation Between Voluntary Carbon Disclosure and Environmental Performance*. Pada penelitian ini, emisi karbon merupakan proksi dari kinerja lingkungan. Peneliti menggunakan ROA, ukuran perusahaan, *financial leverage*, dualitas CEO, ukuran dewan, dan persentase dewan direksi independen sebagai variabel kontrol. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan antara kinerja lingkungan dan tingkat pengungkapan emisi karbon adalah positif.

Penelitian kelima dilakukan oleh Ghozali *et al* (2015) mengenai Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca pada Perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan dan media memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan klasifikasi PROPER dan *Leverage* berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.

## 2.7. Pengembangan Hipotesis

### 2.7.1. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dewan direksi adalah memimpin pelaksanaan roda perusahaan setiap hari melalui kebijakan strategik yang telah disepakati bersama untuk mencapai target dan kinerja yang telah ditentukan oleh RUPS dengan meminimalkan risiko serta tetap menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder* (Daniri, 2005).

Dewan direksi bertanggung jawab untuk memastikan apakah aktivitas operasional perusahaan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu juga, dewan direksi adalah bagian yang mengambil keputusan dalam pengungkapan informasi pada laporan keuangan perusahaan.

Informasi – informasi yang diungkapkan di laporan keuangan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principle*, pengungkapan informasi yang lebih lengkap dapat meminimalisasi masalah yang mungkin terjadi.

Keputusan untuk mengungkapkan emisi karbon pada laporan keuangan perusahaan, dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Salah satu kewenangan dewan direksi adalah mengambil keputusan jangka panjang maupun jangka pendek, mengenai pengungkapan pada laporan keuangan dan memastikan laporan keuangan dibuat sebagaimana mestinya.

Dewan direksi cenderung mendorong perusahaan untuk memberikan lebih banyak informasi kepada pemangku kepentingan karena dewan direksi cenderung memiliki orientasi jangka panjang dalam tanggung jawab sosial perusahaan (Johnson & Greening, 1999; Hillman & Dalziel, 2003). Di sisi lain, pengungkapan emisi karbon dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Manurung, *et al* (2017) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Lorenzo *et al* (2010), yaitu mengindikasikan bahwa walaupun perusahaan mendapat tekanan publik untuk mengungkapkan informasi terkait emisi gas rumah kaca, dewan direksi terkadang menolak untuk melakukan pengungkapan jika ada kemungkinan litigasi yang tinggi, terutama jika biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima.

Ha1 : Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan Emisi Karbon.

### **2.7.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon**

Kepemilikan saham perusahaan oleh manajer dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Besarnya kepemilikan akan menjadi pendorong manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan, karena adanya suatu keselarasan antara kepentingan individu sebagai investor dengan kepentingan perusahaan.

Dengan memiliki proporsi saham dalam perusahaan, manajer akan merasa memiliki perusahaan, sehingga meningkatkan kinerjanya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Jika perusahaan memiliki nilai yang baik, maka akan berdampak pada harga saham yang naik, sehingga dapat menyenangkan hati investor.

Salah satu cara untuk meningkatkan nilai perusahaan adalah dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial pada laporan keuangan. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial untuk menaikkan citra perusahaan, meskipun harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (Gray *et al*, 1998).

Penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto (2016) menunjukkan kepemilikan manajerial secara positif mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Temuan ini sejalan dengan penelitian Uwuigbe (2011) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi dapat berperan besar dalam memantau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan perusahaan.

Ha2 : Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.